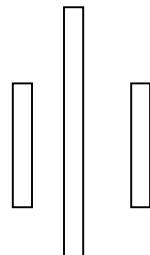
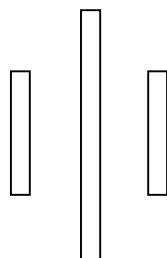




LAPORAN PEMBANGUNAN SUB URUSAN BENCANA TAHUN 2025



TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

**Jalan Semina Jati II Dusun Tonja, Desa Gubug, Kabupaten Tabanan
2025**

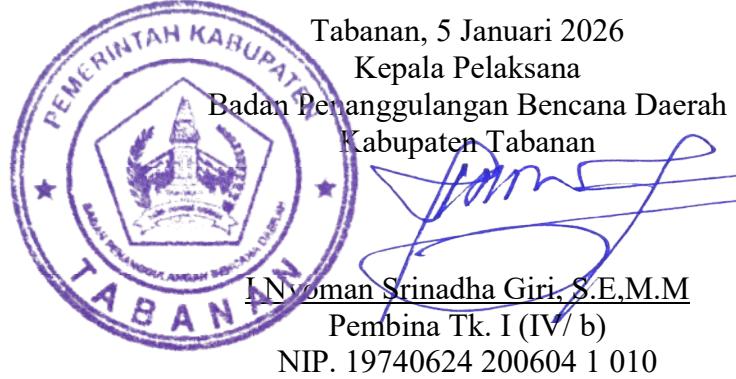
KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Pembangunan Sub Urusan Bencana Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evalausi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil sehingga urusan diimbau dapat dipertanggungjawakan.

Rampungnya laporan kinerja ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga isi laporan ini dapat akuntabel.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Startegis BPBD



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	3
2.1 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci.....	3
2.2 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah	3
2.3 Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan	3
2.4 Pengukuran Indikator Kinerja Utama	3
2.5 Pengukuran Indikator Kinerja Program	4
2.6 Pengukuran Pelaksanaan Keuangan.....	4
2.6 Pengukuran Pelayanan Bencana.....	4
BAB III KINERJA PEMBANGUNAN SUB URUSAN BENCANA	6
3.1 Capaian Kinerja	6
3.2 Evaluasi Kinerja	8
BAB IV PENUTUP	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran.....	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah sesuai komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilien*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan investasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2025 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu strategis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan daerah sub urusan bencana yang merupakan prioritas

urusannya wajib dasar s maka setiap triwulan dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi pembangunan yang dilakukan perangkat daerah di BPBD.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
8. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/264/01/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

1.3. Tujuan.

- a. Memberikan informasi kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan.
- b. Memberikan informasi rencana aksi pembangunan sub urusan bencana di Kabupaten Tabanan.
- c. Memberikan informasi kinerja pembangunan sub urusan bencana di Kabupaten Tabanan secara berkala.

II. RENCANA PEMBANGUNAN SUB URUSAN BENCANA

2.1 Pengukuran indikator Kinerja Kunci

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 yang tertuang pada Misi 1, Tujuan 1 dan Sasaran 1 berkontribusi dalam kunci keberhasilan/kegagalan pemerintah daerah yang dikukur dalam indikator kinerja kunci adalah prosentase capaian SPM urusan wajib dasar.

2.2 Pengukuran indikator Kinerja Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 yang tertuang pada Misi 1, Tujuan 1 dan Sasaran 1 berkontribusi dalam kunci keberhasilan/kegagalan pemerintah daerah yang dikukur dalam indikator kinerja daerah di urusan wajib dasar bidang trantibunlinmas yaitu prosentase waktu tanggap bencana.

2.3 Pengukuran indikator Kinerja Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja tujuan. Adapun *stakeholder* (Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Sosial P3A, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan PLN) yang berperan dalam pencapaian indikator menurunkan Indeks Risiko Bencana yang dikukur dari evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian indikator ketahanan daerah yang nilainya dikeluarkan oleh BNPB. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Tabel Pengukuran Indikator Tujuan

Tujuan BPBD	Indikator tujuan	Formula	Target
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian dari BNPB	144,31
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	85,00

2.4 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja utama. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun targetnya berikut ini.

Tabel 2.2 Pengukuran Indikator Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkat nya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai reviu LKjIP dari Inspektorat	A (81)

2.5 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja program. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun targetnya berikut ini.

Tabel 2.3 Pengukuran Indikator Program

Program	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi pelayanan administrasi dan pelayanan public dibagi target layanan dikalikan 100	100%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Realisasi penanganan bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%

Sumber : DPA, 2025

2.5 Pengukuran Keuangan Pendukung Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 mengelola anggaran pembangunan untuk pelayanan bencana sebagai berikut :

a. APBN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 tidak ada mengelola anggaran dari pusat (APBN), baik itu Dana Tugas Pembantuan, Dadna Dekonsentrasi, maupun Dana Alokasi Khusus.

b. APBD Provinsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 tidak ada mengelola anggaran dari provinsi (APBD Provinsi). Namun menerima kegiatan bencana antara lain :

- Sekretariat BPBD Provinsi Bali : Binwas SPM
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : Penyusunan dokumen renkon
- Bidang Kedaruratan dan Logistik : Penyaluran logistik bencana
- Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi : Pelatihan jitupasna

c. APBD Kabupaten

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 maka BPBD mengelola anggaran :

Jenis belanja	Pagu induk	Pagu perubahan	Keterangan
Belanja operasi	6.050.087.400	6.109.173.300	
-Belanja pegawai	4.149.358.000	4.149.406.400	PNS dan PPPK
-Belanja barang/jasa	1.900.729.400	1.959.766.900	Operasional
Belanja modal	258.323.800	258.323.800	
Peralata dan mesin	258.323.800	258.323.800	Peralatan kerja
Belanja hibah	0	0	
Total	6.308.411.200	6.367.497.100	

2.6 Rencana Aksi Pembangunan Layanan Sub Urusan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 telah merumuskan rencana aksi pembangunan daerah dalam layanan bencana sebagai berikut :

- Pelayanan infomasi rawan bencana bagi warganegara di daerah rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi warganegara di daerah rawan bencana
- Pelayanan evakuasi bagi warganegara yang terdampak/ menjadi korban bencana

III. EVALUASI PEMBANGUNAN

3.1 Monitoring Capaian Indikator Kinerja

Manajemen pada Badan penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan pengukuran capaian kinerja atas indikator kinerja dan layanan bencana sesuai target pembangunan daerah. Adapun hasil monitoringnya sebagai berikut :

a. Capaian IKK

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
S1	Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	36,3 %	62,3 %	82,3 %	96,1 %

b. Capaian IKD

Tabel Capaian Kinerja Daerah

No	Bidang urusan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
5.6	5.6 Trantibun limnas	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100%	100%	100%	100%

c. Capaian IKT

Capaian kinerja utama ini mendukung capaian indikator kinerja tujuan BPBD dan indikator RPJMD SB yaitu :

- menurunkan indeks risiko bencana Tahun 2024 yang terbit bulan Februari 2025 dengan capaian 122,31 hasil penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana setahun sekali (IRB tahun 2024 terbit tahun 2025).
- hasil evaluasi penilaian terhadap reformasi birokrasi perangkat daerah dan kabupaten yang difasilitasi Inspektorat dengan nilai 78,48 setahun sekali. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini.

Tabel Capaian Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	122,31	122,31	122,31	122,31
2	Terwujudnya kualitas	Hasil evaluasi	78,48	84,94	84,94	84,94

	tata kelola pemerintahan di OPD	penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				
--	---------------------------------	---	--	--	--	--

Sumber : Data diolah, 2025

d. Capaian IKU

BPBD dalam mencapai 2 (dua) kinerja utama di tahun 2025 sudah mampu 94,95%. Hasil analisis sebagai berikut :

- Semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administarsi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.
- Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dinilai oleh Isepktorat melalui dokumen LKjIP sebagai bagain dari dokuemn SAKIP sudah memperoleh nilai 62,25 atau B yang dikeluarkan nilainya tahun 2021 dan dengan nilai 70,41 atau BB yang dikeluarkan nilainya di tahun 2023. Hasil LHE 2024 atas SAKIP 2023 telah dikeluarkan LHE oleh Inspektorat dengan nilai BB (71,41.) dan LHE 2025 atas SAKIP 2024 telah dikeluarkan LHE oleh Inspektorat dengan nilai BB (72,85.).

Data berikut ini

Tabel Capaian Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	72,85	72,85	72,85	72,85
	Rata-rata (%)		94,95	94,95	94,95	94,95

Sumber : Data diolah, 2025

e. Capaian IKP

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD sesuai skala prioritas dengan realisasi fisik layanan administrasi dan kelancaran pelayanan publik 100% .
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana dengan realisasi fisik layanan sudah terealisai 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukuran kinerja seperti berikut ini

Tabel Capaian Kinerja Program

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	25,0%	50,0%	75,0%	100%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100,0%	100,0%	100,0%	100%
	Rata-rata (%)		60,5	75,0	87,5	100

d. Capaian Layanan Bencana

Pembangunan sub urusan bencana merupakan urusan wajib dasar, sehingga pemenuhan hak dasar warga di daerah rawan bencana menjadi prioritas layanan bencana yang menjadinya tanggungjawab BPBD. Adapun capaian kinerja layanan bencana yang juga selaras dengan pemberian layanan sesuai SPM dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti berikut ini.

- a. Data Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana : 413.670 jiwa
- b. Data Warga Negara yang Memperoleh Informasi Bencana : 5.235 orang
- c. Data Warga Negara yang Siap siaga Menghadapi Bencana : 100 orang
- d. Data Warga Negara Memperoleh Pertolongan dan Evakuasi Bencana : 10 orang
- e. Data Warga Negara yang Memperoleh Penanganan Bencana : 182 orang

3.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan

a. Capaian Kinerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai suatu investasi bagi semua stakeholder dengan fokus pada masyarakat desa sesuai tujuan pemerintahan yaitu terwujudnya Tabanan tangguh dari desa. Adapun hasil kerja yang dilakukan periode Januari sd Desember 2025 dengan meningkatkan pengetahuan bencana untuk siaga yaitu 93 aparatur, aparat desa sebanyak 225 orang, masyarakat yang rumahnya rawan bencana 370 orang, karyawan swasta 310 orang, guru dan siswa SD, SMP,SMK sebanyak 4.237 orang

b. Capaian Tanggap Bencana dan Penyaluran Logistik

Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Untuk

memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi waktu tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal.

Pengumpulan data kebencanaan dan pelayanannya berbasis aplikasi yang diinput sebagai hasil Tim Reaksi Cepat dalam menangani permohonan masyarakat yang terdampak bencana atau berisiko terdampak bencana. Adapun data tanggap bencana bulan Januari sd Desember 2025 sebanyak 292 titik penanganan .

Penyaluran logistik bagi korban bencana sudah menyalurkan bantuan logistik di bulan Januari sd Desember 2025 sebanyak 350 paket bantuan logistik di 6 kecamatan.

c. Capaian Rekonstruksi dan Rehabilitasi

BPBD telah membentuk Tim sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 180/268/HK/01/2025 tentang Pembentukan Tim Kajian dan Kebutuhan Pasca Bencana

Verifikasi administrasi dan lapangan dilakukan oleh Tim untuk dibuatkan kajian kebutuhan pascabencana dan kajian tersebut dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD. Adapun data survey pasca bencana sudah dilakukan di 182 titik bencana dan yang sudah dapat buatkan hasil kajian kebutuhan rehabilitasinya dan terbantu melalui bansos sebanyak 182 titik (riancian seperti lampiran 1).

3.3 Evaluasi Kinerja Keuangan

Manajemen keuangan sudah dilakukan sesuai SAP dengan tata kelola penatausahaan keuangan. TA 2025 sesuai semangat efisiensi maka setiap belanja dipertimbangkan melakukan efisiensi sehingga terjadi efisiensi yang cukup besar terutama i belanja pegawai karena 21 orang P3K baru mulai diangkat dan dibayar gajinya mulai bulan September-Desember 2025 dan 3 orang Non ASN diangkat menjadi P3K sehingga ada pengehematan pembayaran gaji non ASN. Adapun relaisasi keuangan Januari sd Desember 2025:

Jenis belanja	Pagu induk	Pagu pergeseran	Realisasi	%
Belanja operasi	6.050.087.400	6.038.115.900	4.567.504.643	74,76
-Belanja pegawai	4.149.358.000	4.149.358.000	2.867.768.029	69,11
-Belanja barang/jasa	1.900.729.400	1.693.945.430	1.699.736.614	86,73
Belanja modal	258.323.800	258.323.800	226.810.400	87,80
-Peralata dan mesin	258.323.800	258.323.800	226.810.400	87,80
Belanja hibah	0	0	0	
Total	6.308.411.200	6.296.439.700	4.794.315.043	75,29

Sumber ; LRA, 2025

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja telah dievaluasi secara berkala. Capaian kinerja pembangunan yang menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah diukur secara berkala, dimana periode Januari sd Desember 2025 menunjukan :

- a. Urusan penanggulangan bencana sudah dilaksanakan sesuai amanah Peraturan Daerah kabupaten Tabanan Nomor 9 tahun 2022 oleh BPBD.
- b. Capaian 5 (lima) indikator sudah menunjukkan kinerja yang baik
- c. Capaian 3 (tiga) layanan sudah menunjukkan kinerja yang baik dan tidak ada pengaduan / keluhan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
- d. Realisasi keuangan sebesar 75,29% atau ada penghematan 24,71% dari pagu perubahan Rp. 6.296.439.700,00

4.2 Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja dapat lebih dioptimalkan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan layanan kebencanaan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi lintas instansi dan masyarakat umum (akademisi, dunia usaha, masyarakat rawan bencana).



Lampiran

PELAYANAN WARGA NEGARA RAWAN BENCANA

Periode : Januari sd Desember 2025

No	Kecamatan	WN rawan bencana (orang)	WN dapat KIE (desa)	WN Siaga bencana (desa)	WN tereva kuasi mati (orang)	WN terbantu ekonomi (orang)	WN terbantu logistik (KK)
1	Kediri	89.678	15	15	2	19	263
2	Tabanan	76.800	12	12	1	41	13
3	Kerambitan	43.286	15	15	3	11	12
4	Seltim	24.640	10	10	0	15	0
5	Selema deg	22.346	10	10	0	5	0
6	Selbar	22.192	11	11	0	11	0
7	Marga	44.946	16	16	0	19	17
8	Baturiti	55.352	12	12	1	8	0
9	Penebel	52.573	18	18	0	30	12
10	Pupuan	44.659	14	14	1	23	33
	Jumlah	476.472	133	133	8	182	350

Sekretaris BPBD,
 Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 (PPID) Pelaksana



Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
 NIP. 19760608 200212 1 009